

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR PENGHAMBAT DALAM  
PELAKSANAAN ANGGARAN KEGIATAN PENGAWASAN  
KEIMIGRASIAN DI KANTOR IMIGRASI KELAS I  
PALEMBANG TAHUN 2018**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan  
dalam Menempuh Derajat Sarjana S-1  
Ilmu Administrasi Publik**



**Diajukan oleh :**

**ESSY ELFERA NICA  
07011281520170**

**Konsentrasi Keuangan Negara**

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
2020**

**HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI**

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR PENGHAMBAT  
DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN  
PENGAWASAN KEIMIGRASIAN DI KANTOR  
IMIGRASI KELAS I PALEMBANG TAHUN 2018**

**SKRIPSI**

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana S-1  
Ilmu Administrasi Publik**

**Oleh :**

**ESSY ELFERA NICA  
07011281520170**

**Telah Disetujui oleh Dosen Pembimbing,**

**Pembimbing I**

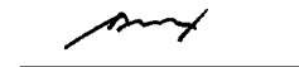
**Dr. Lili Erina, M.Si  
NIP. 196612301992032001**



---

**Pembimbing II**

**Drs. Mardianto, M.Si  
NIP. 196211251989121001**



---

**HALAMAN PERSETUJUAN**

Skripsi dengan judul “*Analisis Faktor-Faktor Penghambat dalam Pelaksanaan Anggaran Kegiatan Pengawasan Keimigrasian di Kantor Imigrasi Kelas I Palembang Tahun 2018*” telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya pada tanggal 13 Agustus 2020.

Indralaya, 13 Agustus 2020

**Ketua**

1. Dr. Lili Erina, M.Si.  
NIP. 196612301992032001



**Anggota**

2. Drs. Mardianto, M.Si.  
NIP. 196211251989121001



3. Ermanovida, S.Sos., M.Si.  
NIP. 191911191998032001



4. Dwi Mirani, S.IP., M.Si.  
NIP. 196211251989121001



Mengetahui,  
Dekan FISIP

Prof. Dr. Kiagus Muhammad Sobri, M.Si  
NIP. 196311061990031001

Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik



Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA  
NIP. 198108272009121002

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

**Sesungguhnya Bersama Kesulitan Ada Kemudahan. Maka Apabila Kamu Telah Selesai (Dari Sesuatu Urusan), Kerjakan lah Dengan Sungguh-Sungguh (Urusan) Yang Lain. Dan Hanya Kepada Tuhanmulah Engkau Berharap.**

**(QS. 94:6-8)**

Skripsi ini kupersembahkan kepada:

1. Kedua orang tuaku, Ayahanda Rasuludin dan Ibunda Elly Setyarini
2. Adik-adikku, Mifta Gianda dan Tiara Denta Natsyah
3. Dosen dan Pegawai Fisip Unsri
4. Almamater Universitas Sriwijaya

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT karena berkat rahmat dan perlindungan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul “Analisis Faktor-faktor Penghambat Pelaksanaan Anggaran Kegiatan Pengawasan Keimigrasian di Kantor Imigrasi Kelas I Palembang Tahun 2018.” Dalam penyelesaian skripsi, Penulis menyadari banyak memperoleh bantuan, bimbingan dan pengarahan dari berbagai pihak yang berkaitan dengan penyelesaian skripsi ini. Untuk itu dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, M.S.C.E selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
2. Bapak Prof. Dr. Kiagus Muhammad Sobri, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya, Bapak Prof. Alfitri, M.Si. selaku Wakil Dekan I, Bapak Sofyan Effendi, S.IP, M.Si. selaku Wakil Dekan II, dan Bapak Dr. Andy Alfatih, MPA. selaku Wakil Dekan III FISIP Unsri yang telah memberikan kemudahan dalam proses pembuatan skripsi ini.
3. Bapak Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik FISIP Unsri dan Ibu Ermanovida, S.Sos., M.Si selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Publik FISIP Unsri yang telah memperlancar penyusunan skripsi ini.
4. Ibu Dr. Lili Erina, M.Si selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Dr. Mardianto, M.Si selaku Dosen Pembimbing II yang selalu meluangkan waktu, memberikan bimbingan, masukan, saran, dan nasehat yang sangat berguna dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Ibu Dra. Nurmah Semil M.Si selaku dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing penulis selama masa perkuliahan.
6. Bapak dan Ibu Dosen, serta segenap staf karyawan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya yang telah mengajarkan ilmu dan pendidikan kepada penulis mulai awal perkuliahan hingga menyelesaikan studi.
7. Seluruh staf pegawai Kantor Imigrasi Kelas I Palembang yang telah banyak membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini.
8. Kedua orang tua terkasih dan keluarga yang tak pernah lelah memberikan dukungan selama perkuliahan dan mendoakan anak-anaknya dapat sukses dunia dan akhirat. Terima kasih atas doa, bantuan dan dukungannya baik yang bersifat moril maupun materil.
9. Seluruh teman-teman satu jurusan di Ilmu Administrasi Publik 2015 yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.
10. Semua pihak yang telah membantu dan memberikan arahan serta masukan yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan karunia, limpahan rahmat dan hidayah-Nya atas semua kebaikan yang telah diberikan kepada penulis. Atas segala perhatian dan kerjasamanya penulis ucapkan terima kasih. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan bagi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dalam menambah wawasan dan pengetahuan kita bersama.

Palembang, Agustus 2020

Penulis

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Faktor-Faktor Penghambat dalam Pelaksanaan Anggaran Kegiatan Pengawasan Keimigrasian di Kantor Imigrasi Kelas I Palembang Tahun 2018. Pagu anggaran pengawasan keimigrasian tahun 2018 menurun dibandingkan dengan pagu anggaran tahun 2017. Selain itu terdapat anggaran kegiatan Pengawasan Keimigrasian yang tidak terserap di Tahun 2018. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Konsep Bastian; dalam pelaksanaan anggaran terdapat prinsip yang harus diperhatikan yakni ketepatan waktu, pemanfaatan kemajuan teknologi dan pengendalian internal. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian ditemukan bahwa perencanaan dana anggaran dilaksanakan tepat waktu, tetapi terjadi keterlambatan pada pelaksanaan dan pertanggungjawaban. Rencana anggaran dipersiapkan dan dilaksanakan dengan membuat Kerangka Acuan Kerja. Prioritas anggaran direncanakan dan dilaksanakan dengan pembuatan Kategori Program Unggulan. Pemanfaatan Kemajuan Teknologi Informasi dilaksanakan dengan menyediakan halaman pengaduan online melalui website. Pengendalian Internal direncanakan dan dilaksanakan berpedoman pada regulasi yang ada. Laporan belanja dilaksanakan dengan pembuatan laporan aktivitas kegiatan. Berdasarkan prinsip tersebut dapat dikatakan bahwa Pelaksanaan Anggaran Kegiatan Pengawasan Keimigrasian Kantor Imigrasi Palembang telah direncanakan meskipun dalam pelaksanaan terjadi keterlambatan, hanya saja upaya yang mesti dilakukan lebih maksimal dari aspek perencanaan anggaran yaitu Bendahara seksi Pengawasan Keimigrasian membuat Rencana Kerja dan Anggaran sesuai prioritas kebutuhan. Kantor Imigrasi dalam pelaksanaan kegiatan keimigrasian diharapkan memperluas sosialisasi pengaduan online, serta pada pertanggungjawaban anggaran diharapkan lebih meningkatkan pengawasan internal dan dalam pembuatan laporan kegiatan harus dilakukan tepat waktu agar pencairan dana berjalan lancar.

**Kata Kunci: Pelaksanaan, Anggaran, Pengawasan, Keimigrasian, Perencanaan, Pelaksanaan, Pertanggungjawaban**

Pembimbing I



Dr. Lili Erina, M.Si  
NIP. 19661230 199203 2001

Pembimbing II



Drs. Mardianto, M.Si  
NIP. 19621125 198912 1001

Palembang, Agustus 2020  
Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Sriwijaya

Zailani Surya Marpaung, S.Sos,MPA  
NIP. 198108272009121002

## ABSTRACT

*This study aims to determine factors inhibiting the implementation of immigration supervision budget activities at the Palembang Class I Immigration Office in 2018. The 2018 immigration supervision budget ceiling decreases compared to the 2017 budget ceiling. In addition, there is a budget for immigration supervision activities that are not absorbed in the implementation of the budget there is a principle that must be considered, namely timeliness, the performance of technological advances and internal control. This study uses qualitative methods. The data collection technique used is interviews, observation, and documentation. The results of the study found that budget planning was carried out on time, but there was a delay in implementation and accountability. The budget plan is prepared and implemented by making a work reference frame. The priority of the budget is planned and implemented by making a superior program category. Utilization of the advancement of information technology is carried out by providing a complaints page online through the website. Internal control is planned and implemented by the existing regulation. Expenditures are carried out by making activity activities. Based on the principle it can be said that the implementation of the budget of the immigration supervision of the Palembang Immigration Office has been planned even though in the implementation of delays, it is only an effort that must be done more maximally from the aspects of budget planning, namely the treasurer of the immigration supervision section made work plans and budgets according to priority Then the Immigration Office in the implementation of immigration activities is expected to expand the socialization of complaints online. As well as budget accountation, it is expected to increase internal supervision and in making activities for activities must be carried out on time so that the disbursement of funds runs smoothly.*

**Keywords: Implementation, Budget, Oversight, Immigration, Planning, Implementation, Accountability**

*Advisor I*



Dr. Lili Erina, M.Si  
NIP. 196612301992032001

*Advisor II*



Drs. Mardianto, M.Si  
NIP. 196211251989121001

*Chair of the Department of Public Administration  
Faculty of Social Science and Political Science  
Sriwijaya University*

Zailani Surya Marpaung, S.Sos.,MPA  
NIP. 19810827200912002

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI</b> .....	ii
<b>MOTTO</b> .....	iii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iv
<b>ABSTRAK</b> .....	v
<b>DAFTAR ISI</b> .....	vii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	x
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xi
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xii
<b>DAFTAR SINGKATAN</b> .....	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Manfaat Penelitian .....	5
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	6
A. Landasan Teori .....	6
1. Keuangan Negara .....	6
2. Anggaran .....	8
3. Pelaksanaan Anggaran .....	11
4. Pengawasan Keimigrasian .....	18
5. Teori Pelaksanaan Anggaran yang Digunakan .....	23
B. Penelitian Terdahulu .....	27
C. Kerangka Pemikiran .....	28
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	31
A. Jenis Penelitian .....	31
B. Definisi Konsep .....	32
C. Fokus Penelitian .....	33
D. Data dan Sumber Data .....	34
E. Informan Penelitian .....	34
F. Teknik Pengumpulan Data .....	35
G. Teknik Analisis Data .....	36
H. Sistematika Penulisan .....	38
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN</b> .....	40
A. Gambaran Umum Lokasi .....	40
1. Sejarah Kantor Imigrasi Kelas I Palembang .....	40
2. Lokasi Kantor Imigrasi Kelas I Palembang .....	42
3. Visi, Misi, Motto, Kebijakan Mutu dan Janji Layanan .....	43
4. Tugas dan Fungsi Kantor Imigrasi Palembang .....	43
5. Struktur Organisasi Kantor Imigrasi Palembang .....	46



6. Jumlah Pegawai Kantor Imigrasi Kelas I Palembang .....	52
7. Anggaran Pengawasan Keimigrasian Tahun 2018 .....	53
B. Analisis Pelaksanaan Anggaran Kegiatan Pengawasan Keimigrasian .....	56
1. Analisis Ketepatan Waktu .....	57
1.1 Analisis Ketepatan Waktu pada Siklus Tahap Perencanaan Anggaran Pengawasan Keimigrasian Tahun 2018 .....	57
1.1.a Analisis Ketepatan Waktu pada Tahap Perencanaan Anggaran dalam Pengumpulan Data .....	58
1.1.b Analisis Ketepatan Waktu Pada Tahap Perencanaan Anggaran dalam Penentuan Prioritas Anggaran .....	62
1.1.c Analisis Ketepatan Waktu pada Tahap Perencanaan Anggaran dalam Pembuatan Draf Anggaran .....	66
1.2 Analisis Ketepatan Waktu pada Tahap Pelaksanaan Anggaran Pengawasan Keimigrasian Tahun 2018 .....	69
1.2.a Analisis Ketepatan Waktu pada Tahap Pelaksanaan Anggaran dalam Pengajuan Anggaran .....	70
1.2.b Analisis Ketepatan Waktu pada Tahap Pelaksanaan Anggaran dalam Pencairan Anggaran .....	73
1.3 Analisis Ketepatan Waktu pada Tahap Pertanggungjawaban Anggaran Pengawasan Keimigrasian Tahun 2018 .....	76
1.3.a Analisis Ketepatan Waktu pada Tahap Pertanggungjawaban Anggaran dalam Pelaporan Keuangan .....	77
1.3.b Analisis Ketepatan Waktu pada Tahap Pertanggungjawaban Anggaran dalam Evaluasi Kegiatan .....	80
2. Analisis Pemanfaatan Kemajuan Teknologi Informasi .....	85
2.1 Analisis Pemanfaatan Kemajuan Teknologi Informasi pada Tahap Perencanaan Anggaran Pengawasan Keimigrasian Tahun 2018.....	85
2.1.a Analisis Pemanfaatan Kemajuan Teknologi Informasi pada Tahap Perencanaan dalam Pengumpulan Data .....	88
2.1.b Analisis Pemanfaatan Kemajuan Teknologi Informasi pada Tahap Perencanaan dalam Penentuan Prioritas Anggaran .....	91
2.1.c Analisis Pemanfaatan Kemajuan Teknologi Informasi pada Tahap Perencanaan dalam Pembuatan Draf Anggaran .....	94
2.2 Analisis Pemanfaatan Kemajuan Teknologi Informasi pada Tahap Pelaksanaan Anggaran Pengawasan Keimigrasian Tahun 2018.....	94
2.2.a Analisis Pemanfaatan Kemajuan Teknologi Informasi pada Tahap Pelaksanaan Anggaran dalam Pengajuan Anggaran .....	97
2.2.b Analisis Pemanfaatan Kemajuan Teknologi Informasi pada Tahap Pelaksanaan Anggaran dalam Pencairan Anggaran .....	100
2.3 Analisis Pemanfaatan Kemajuan Teknologi Tahap Pertanggungjawaban Anggaran Tahun 2018.....	100
2.3.a Analisis Pemanfaatan Kemajuan Teknologi Tahap Pertanggungjawaban Anggaran dalam Pelaporan .....	103
2.3.b Analisis Pemanfaatan Kemajuan Teknologi Informasi pada Tahap Pertanggungjawaban Anggaran dalam Evaluasi Anggaran .....	106
3. Analisis Pengendalian Internal .....	107

3.1 Analisis Pengendalian Internal pada Tahap Perencanaan Pengawasan Keimigrasian Tahun 2018 .....	107
3.1.a Analisis Pengendalian Internal pada Tahap Perencanaan dalam Pengumpulan Data .....	110
3.1.b Analisis Pengendalian Internal pada Tahap Perencanaan dalam Penentuan prioritas Anggaran .....	114
3.1.c Analisis Pengendalian Internal pada Tahap Perencanaan dalam Pembuatan Draf .....	116
3.2 Analisis Pengendalian Internal pada Tahap Pelaksanaan Pengawasan Keimigrasian Tahun 2018 .....	117
3.2.a Analisis Pengendalian Internal pada Tahap Pelaksanaan dalam Pengajuan Anggaran .....	119
3.2.b Analisis Pengendalian Internal pada Tahap Pelaksanaan dalam Pencairan Anggaran.....	122
3.3 Analisis Pengendalian Internal pada Tahap Pertanggungjawaban Pengawasan Keimigrasian Tahun 2018 .....	122
3.3.a Analisis Pengendalian Internal pada Tahap Pertanggungjawaban dalam Pembuatan Laporan.....	125
3.3.b Analisis Pengendalian Internal pada Tahap dalam Evaluasi kegiatan .....	
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>130</b>
A. Kesimpulan .....	130
B. Saran .....	131

**Daftar Pustaka**  
**Lampiran**

## DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Anggaran Kegiatan Pengawasan Keimigrasian di Kantor Imigrasi Kelas I Palembang Tahun 2017-2018 .....	2
2. Realisasi Anggaran Kegiatan Pengawasan Keimigrasian di Kantor Imigrasi Kelas I Palembang Tahun 2017-2018 .....	3
3. Hak dan Kewajiban Negara .....	7
4. Penelitian Terdahulu .....	27
5. Fokus Penelitian .....	33
6. Jumlah Pegawai Kantor Imigrasi Kelas I Palembang Berdasarkan Jenis Kelamin..	52
7. Jumlah Pegawai Kantor Imigrasi Kelas I Palembang Berdasarkan Golongan .....	52
8. Jumlah Pegawai Kantor Imigrasi Kelas I Palembang Berdasarkan Pendidikan .....	53
9. Realisasi Anggaran Kegiatan Pengawasan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I Palembang Tahun 2018 .....	54
10. Peraturan Pemerintah .....	61
11. Daftar Realisasi Proker Seksi Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I Palembang Tahun 2018 .....	71
12. Syarat Pencairan Anggaran Pengawasan Keimigrasian .....	74
13. Persyaratan Pencairan Anggaran Pengawasan Keimigrasian .....	75
14. Anggaran kegiatan Pengawasan Keimigrasian Tahun 2017-2018.....	82
15. Draft Isian Petikan Anggaran (DIPA) .....	92
16. Draft Isian Petikan Anggaran (DIPA) .....	111
16. Daftar Proker Seksi Pengawasan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I Palembang Tahun 2018 .....	115
17. Peraturan Pemerintah .....	118
18. Regulasi Pengawasan .....	127

## DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Siklus Realisasi Anggaran Publik .....	13
2. Kerangka Pemikiran .....	30
3. Kantor Imigrasi Kelas I Palembang .....	42
4. Daftar Proker WASDAKIM .....	64
5. Kerangka Kerja Seksi Pengawasan Keimigrasian .....	68
6. Laporan Realisasi Anggaran Kantor Imigrasi Kelas I Palembang .....	78
7. Layanan BAP Secara Online Kanim Palembang .....	87
8. Website Pengaduan Online Kanim Palembang .....	90
9. Standar Biaya Keluaran Kanim Palembang .....	98
10. Website Pengaduan Online Kanim Palembang .....	101
11. Laporan Aktivitas Kegiatan Pengawasan Keimigrasian .....	105
12. Peraturan Pencairan Anggaran Kantor Imigrasi Kelas I Palembang .....	108
13. Laporan Aktivitas Kegiatan .....	120
14. Laporan Realisasi Anggaran .....	123
15. Rapat Bulanan Kanim Palembang .....	126

## DAFTAR LAMPIRAN

### Lampiran

1. Surat Tugas Dosen Pembimbing Seminar Usulan Skripsi .....
2. Kartu Bimbingan dengan Dosen I .....
3. Kartu Bimbingan dengan Dosen II .....
4. Surat Permohonan Izin Penelitian .....
5. Pedoman Observasi .....
6. Pedoman Wawancara .....
7. Pedoman Dokumentasi .....
8. Undang-Undang RI No 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara .....
9. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No 4 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Keimigrasian .....
10. Peraturan Pemerintah RI No 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian .....
11. Data Tindakan Administratif Keimigrasian Berupa Deportasi pada Kantor Imigrasi Kelas I Palembang Tahun 2016-2018 .....
12. Laporan Realisasi Kantor Imigrasi Kelas I Palembang Tahun 2018 .....

## DAFTAR SINGKATAN

APBN	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
APBD	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
BAP	: Berita Acara Pemeriksaan
BBM	: Bahan Bakar Minyak
BPKAD	: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
BNN	: Badan Narkotika Nasional
DIPA	: Daftar Isian Perencanaan Anggaran
DPRI	: Dokumen Perjalanan Republik Indonesia
DAHSUSKIM	: Daerah Khusus Keimigrasian
ITK	: Izin Tinggal Kunjungan
ITAS	: Izin Tinggal Terbatas
ITAP	: Izin Tinggal Tetap
KAK	: Kerangka Acuan Kerja
KPK	: Komisi Pemberantasan Korupsi
KAKANWIL	: Kepala Kantor Wilayah
KIMDA	: Kantor Imigrasi Daerah
OI	: Ogan Ilir
OKI	: Ogan Komering Ilir
PNBP	: Penerimaan Negara Bukan Pajak
PERPRES	: Peraturan Presiden
PMK	: Peraturan Menteri Keuangan
PROKER	: Program Kerja
RAB	: Rencana Anggaran Belanja
RAK	: Rencana Anggaran Kerja
RKA	: Rencana Kerja dan Anggaran
RKA-KL	: Rencana Kerja Anggaran Kementerian dan Lembaga
RPD	: Rencana Pendistribusian Dana
SUMSEL	: Sumatera Selatan
SPRINT	: Surat Perintah Tugas
SKPD	: Surat Keterangan Pelaksanaan Dinas
SBM	: Standar Biaya Masukan
SBK	: Standar Biaya Keluaran
SIMKIM	: Sistem Informasi Keimigrasian
SOP	: Standar Operasional Prosedur
SDM	: Sumber Daya Manusia
TAK	: Tindakan Administratif Keimigrasian
TPI	: Tempat Pemeriksaan Keimigrasian
TKP	: Tempat Kejadian Perkara
TIMPORA	: Tim Pengawasan Orang Asing
WNI	: Warga Negara Indonesia
WNA	: Warga Negara Asing
WASDAKIM	: Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Keimigrasian merupakan bagian dari perwujudan pelaksanaan penegakan kedaulatan atas wilayah Indonesia dalam rangka menjaga ketertiban kehidupan berbangsa dan bernegara menuju masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian pengertian keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara.

Pengawasan keimigrasian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengumpulkan, mengolah, serta menyajikan data dan informasi keimigrasian Warga Negara Indonesia dan orang asing dalam rangka memastikan dipatuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keimigrasian. Fungsi dari pengawasan keimigrasian adalah untuk melakukan pemantauan terhadap pelanggaran perizinan keimigrasian dan mengadakan kerjasama antar instansi di bidang pengawasan orang asing. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian terdapat dua unsur pengaturan yang penting dalam pengawasan keimigrasian yaitu:

- 1) Pengaturan tentang berbagai hal mengenai lalu lintas orang keluar masuk dan tinggal dari dan kedalam Wilayah Negara Republik Indonesia
- 2) Pengaturan tentang berbagai hal mengenai pengawasan orang asing di wilayah Republik Indonesia

Pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas I Palembang memerlukan anggaran untuk mencapai target yang telah ditetapkan. Pelaksanaan anggaran pengawasan keimigrasian diperlukan untuk keberlangsungan organisasi, terutama pelaksanaan anggaran kegiatan pengawasan dan penindakan keimigrasian baik terhadap Warga Negara Indonesia (WNI) maupun Warga Negara Asing (WNA). Sumber anggaran Kantor Imigrasi berasal dari kegiatan pelayanan yang dilakukan, seperti pembuatan paspor bagi Warga Negara Indonesia (WNI), pembuatan visa bagi Warga Negara Asing (WNA) dan pembuatan izin keimigrasian bagi Warga Negara Asing (WNA) sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No.45 Tahun 2014 tentang Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan HAM.

Anggaran kegiatan pengawasan keimigrasian yang disusun oleh seksi Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I Palembang tahun 2018 mengalami penurunan pagu anggaran dibandingkan dengan jumlah anggaran di tahun 2017. Untuk lebih jelasnya dapat kita lihat pada tabel berikut:

**Tabel 1. Anggaran Kegiatan Pengawasan Keimigrasian di Kantor Imigrasi Kelas I Palembang Tahun 2017 - 2018**

No	Tahun	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran
1	2017	550.666.000	478.871.800
2	2018	276.330.000	253.990.750

*Sumber: Laporan Realisasi Kantor Imigrasi Kelas I Palembang Tahun 2017-2018.*

Berdasarkan data pada tabel tersebut, terlihat bahwa terjadi penurunan pagu anggaran kegiatan pengawasan keimigrasian pada tahun 2018. Anggaran pengawasan keimigrasian tahun 2017 yaitu sebesar Rp 550.666.000 sedangkan anggaran pada tahun 2018 hanya



sebesar Rp 276.330.000. Pada data tersebut terlihat perbedaan yang cukup signifikan antara jumlah anggaran tahun 2017 dengan anggaran tahun 2018, dimana selisihnya hampir setengah dari anggaran tahun 2017 yaitu sebesar Rp 274.336.000.

Pelaksanaan anggaran diperlukan untuk keberlangsungan organisasi, salah satunya pelaksanaan anggaran kegiatan pengawasan keimigrasian baik terhadap Warga Negara Indonesia (WNI) maupun Warga Negara Asing (WNA) secara efektif dan efisien agar keuangan dapat tetap stabil. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Pasal 280 Ayat 1 dan 2 dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang diserahkan atau ditugaskan, penyelenggara pemerintah daerah memiliki kewajiban dalam pengelolaan keuangan daerah yaitu meliputi mengelola dana secara efektif, efisien, ekonomis, transparan dan akuntabel. Data realisasi anggaran pengawasan keimigrasian pada Kantor Imigrasi Palembang tahun 2017-2018 dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2. Realisasi Anggaran Kegiatan Pengawasan Keimigrasian di Kantor Imigrasi Kelas I Palembang Tahun 2018**

<b>Nama Kegiatan</b>	<b>Tahun</b>	<b>Pagu Anggaran</b>	<b>Realisasi Anggaran</b>	<b>Sisa Anggaran</b>	<b>%</b>
<b>Pengawasan Keimigrasian</b>	<b>2017</b>	<b>550.666.000</b>	<b>478.871.800</b>	<b>71.794.200</b>	<b>87</b>
- Fasilitas Fungsi Pengawasan Keimigrasian di Daerah		309.900.000	53.612.650	24.163.350	69
- Operasional Intelijen Keimigrasian di Sumsel		77.776.000	53.612.650	24.163.350	69
- Operasi Pemantauan Keimigrasian di Sumsel		96.070.000	83.807.750	12.262.250	86
- Operasi Gabungan Pengawasan Keimigrasian di Sumatera		66.920.000	50.873.500	16.046.500	76
<b>Pengawasan Keimigrasian</b>	<b>2018</b>	<b>276.330.000</b>	<b>253.990.750</b>	<b>22.339.250</b>	<b>91</b>
- Pengawasan Administratif		170.360.000	160.070.500	10.289.500	93
- Penyelidikan Intelijen		32.140.000	29.149.100	2.990.900	90
- Operasi Mandiri dalam Rangka Pengawasan Lapangan		40.730.000	36.465.400	4.264.000	89
- Operasi Gabungan dalam Rangka Pengawasan Lapangan		33.100.000	28.305.750	4.794.250	85

*Sumber: Laporan Realisasi Kantor Imigrasi Kelas I Palembang Tahun 2018.*

Pada tabel tersebut terlihat bahwa realisasi anggaran pengawasan keimigrasian pada tahun 2017 hanya mencapai 87 persen, sedangkan anggaran tahun 2018 mengalami penurunan pagu anggaran dengan realisasi sebesar 91 persen. Pengurangan pagu anggaran di tahun 2018 menyebabkan kenaikan pada tingkat realisasi anggaran pengawasan keimigrasian. Selain itu pada tahun 2017 beberapa kegiatan pengawasan keimigrasian realisasinya masih kurang optimal seperti fasilitas fungsi pengawasan keimigrasian di daerah dan operasional intelijen keimigrasian di sumsel realisasinya hanya mencapai 69 persen. Secara garis besar dengan adanya pengurangan anggaran pada seksi pengawasan keimigrasian berdampak pada pencapaian realisasi yang lebih optimal oleh petugas seksi pengawasan keimigrasian yakni jika diratakan menjadi 89 persen.

Penelitian ini berfokus pada pelaksanaan anggaran kegiatan pengawasan dan penindakan keimigrasian di Kantor Imigrasi Kelas I Palembang. Berdasarkan sejumlah fakta dilapangan, peneliti telah mengidentifikasi permasalahan diantaranya terjadi penurunan pagu anggaran pengawasan keimigrasian di tahun 2018 dibandingkan tahun 2017 yaitu Rp 550.666.000 menjadi Rp 276.330.000 dengan selisih anggaran sebesar Rp 274.336.000 dan penyerapan anggaran kegiatan pengawasan keimigrasian yang belum mencapai target yang telah ditetapkan. Penulis perlu melakukan penelitian lebih lanjut mengenai bagaimana Pelaksanaan Anggaran Kegiatan Pengawasan Keimigrasian oleh Seksi Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian tahun 2018 di Kantor Imigrasi Kelas I Palembang. Hasil analisis dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi seksi pengawasan dan penindakan keimigrasian untuk pengambilan keputusan dalam mengelola pelaksanaan anggaran kegiatan di tahun berikutnya agar dalam penggunaan anggaran sesuai dengan target yang telah ditetapkan dan berjalan secara efektif dan efisien.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah yang ada adalah: “Apa Faktor-Faktor Penghambat dalam Pelaksanaan Anggaran Kegiatan Pengawasan Keimigrasian di Kantor Imigrasi Kelas I Palembang Tahun 2018?”.

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah: “Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan anggaran kegiatan pengawasan keimigrasian di Kantor Imigrasi Kelas I Palembang Tahun 2018”

## **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini diklasifikasikan menjadi dua yaitu:

### **1. Manfaat Teoritis**

Sebagai bahan referensi dan bahan kajian dalam Ilmu Administrasi Negara untuk mengetahui tentang keuangan sektor publik, terutama mengenai analisis pelaksanaan anggaran kegiatan pengawasan keimigrasian oleh Seksi Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian di Kantor Imigrasi Kelas I Palembang Tahun 2018.

### **2. Manfaat Praktis**

Sebagai bentuk upaya perbaikan pelaksanaan anggaran khususnya pada kegiatan pengawasan dan penindakan keimigrasian oleh Seksi Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian di Kantor Imigrasi Kelas I Palembang Tahun 2018

## Daftar Pustaka

### **Sumber Buku:**

- Adisasmita, Rahardjo. 2011. *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Bastian, Indra. 2010. *Akuntansi Sektor Publik : Suatu Pengantar*. Jakarta: Erlangga.
- Bragg, Steven M. 2014. *Penganggaran (Budgeting) : Panduan Komprehensif*. Jakarta Barat: Indeks.
- Bastian, Indra. 2007. *Sistem Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, Abdul. 2002. *Akuntansi Sektor Publik - Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Kamaroesid, Herry. 2013. *Sistem Administrasi Anggaran Negara (Sistem Administrasi APBN Mulai T.A. 2013)*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Leonardo, Andreas. 2011. *Administrasi Pemerintahan Daerah*. Malang: Tunggal Mandiri Publishing.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit Andi. Yogyakarta.
- Pedoman Penulisan Skripsi Jurusan Ilmu Administrasi Negara. 2014. Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Palembang: Universitas Sriwijaya
- Renyowijoyo, Muindro. 2018. *Akuntansi Sektor Publik : Organisasi Non Laba*. Edisi 2. Jakarta: Mitra Wicaksana Media.
- Rudianto. 2009. *Penganggaran : Konsep dan Teknik Penyusunan Anggaran*. Jakarta: Erlangga.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Administrasi*. Alfabeta : Bandung.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta.
- Suparmoko, M. 2013. *Keuangan Negara Dalam Teori dan Praktik*. Yogyakarta: BPF.
- Syafiie, Inu Kencana. 2010. *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia (SANRI)*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Soleh, Chabib dan Heru Rochmansjah. 2014. *Pengelolaan Keuangan Desa*. Bandung: Fokus Media. 2014.
- Terry, G. R. 2016. *Prinsip-prinsip Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara
- Yani, Ahmad. 2008. *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.

### **Sumber Peraturan:**

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Undang- undang No. 31 Tahun 2013 Tentang perubahan pelaksanaan Undang- undang No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.

Peraturan Menteri Keuangan No.49/PMK/02/2017 tentang Standar Masukan 2018.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.4 Tahun 2017

Tentang Tata Cara Pengawasan Keimigrasian.

Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No.45 Tahun 2014 tentang Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan HAM.

Petunjuk Pelaksanaan No IMI-PR.01.02-4483 tentang Standar Biaya Keluaran (SBK) Bidang Keimigrasian TA 2018

Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor:M.03-PR.07.04 Tahun 1991 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi

### **Sumber Jurnal:**

Sari, Poppy Arvina. 2015. *Analisis Pelaksanaan Anggaran Belanja yang Bersumber dari PNB (Studi Kasus Pada Kantor Imigrasi Kelas I Padang*. Skripsi Tidak Diterbitkan. Padang: Program Sarjana Strata 1 ANDALAS.

Lobubun, Ridwan. 2016. *Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Anggaran Pasca penerapan Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik Pada Kantor Imigrasi Kelas I Yogyakarta*. Skripsi Tidak Diterbitkan. Yogyakarta: Program Sarjana Strata 1 UGM.

Utami, Yurima. 2017. *Pengelolaan Anggaran Kegiatan Pendetensian Deteni Tahap Perawatan oleh Subseksi Penindakan Keimigrasian Tahun 2017 di Ruang Deteni Kantor Imigrasi Kelas I Palembang*. Indralaya : Program Sarjana Strata 1 UNSRI.